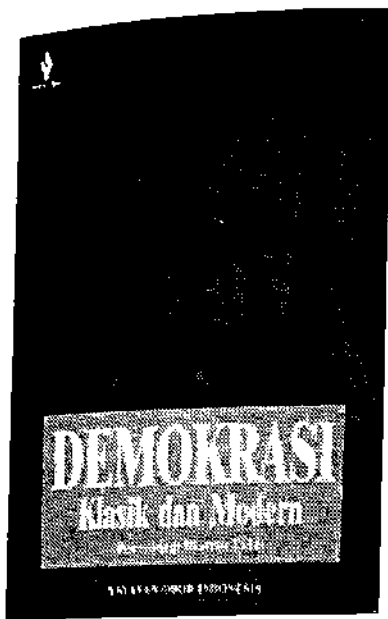


TIMBANGAN BUKU

“AGAMA” DARI BARAT, DARI MASA KE MASA

Diane Ravitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern* (diterjemahkan oleh Hermoyo, disunting oleh Mochtar Lubis), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, xvi + 266 halaman, Rp. 9.000,-



Buku ini aslinya berjudul *“The Democracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essays, Poems, Declaration, and Document on Freedom and Human Rights Worldwide,”* dan kemudian disunting kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi *“Demokrasi Klasik dan Modern”* oleh sastrawan Mochtar Lubis. Seperti tersebut dalam judul aslinya, isi buku ini sebenarnya merupakan kumpulan dari pidato, esai, puisi, pernyataan, dan dokumen lainnya tentang kebebasan dan hak-hak asasi manusia di seantero dunia. Oleh penyunting Indonesianya (Mochtar Lubis), bunga rampai tersebut diseleksi ulang hingga menjadi 23 tulisan saja.

Alasan Mochtar Lubis untuk mempersingkat isi buku ini sangat sederhana, yakni agar jumlah halamannya tidak terlampau banyak, yang membawa konsekuensi membengkaknya harga per satuan buku tersebut. Tentu saja pertimbangan yang logis ini cukup disayangkan apabila kita ingin menjadikan buku ini sebagai referensi yang komprehensif tentang pemikiran demokrasi sejak jaman klasik sampai jaman kontemporer. Mungkin langkah selanjutnya, dapat dipikirkan untuk menerbitkan kembali edisi kedua dari buku ini. Sebab, jika dikalkulasi ulang, dapat dipastikan harga dua edisi buku itupun tetap akan lebih murah daripada edisi aslinya.

Pemikiran demokrasi dalam buku ini dibuka oleh Plato, diteruskan oleh muridnya, Aristoteles. Dua tokoh ini adalah filsuf alam yang paling terkenal (bersama dengan Sokrates) pada masa klasik. Kemudian muncul tokoh John Milton, John Locke, Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche, Thomas Jefferson, Alexis de Tocqueville, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt,

dan Martin Luther King Jr. Dari 23 tulisan itu, ada banyak karya yang ditulis oleh orang yang sama. John Stuart Mill dan Martin Luther King Jr. masing-masing muncul dalam dua tulisan, Abraham Lincoln dalam tiga tulisan, dan Thomas Jefferson dalam empat tulisan. Di samping itu terdapat pula terjemahan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan oleh Majelis Nasional Perancis tahun 1789.

Terbatasnya karya-karya hanya pada 23 penulis di atas juga amat terbatas untuk dapat mewakili perjalanan gagasan demokrasi dari masa klasik sampai jaman modern. Pemikiran terbaru yang diungkapkan dalam buku ini berasal dari pertengahan Abad ke-20, khususnya pandangan Martin Luther King Jr., tokoh hak-hak sipil Amerika. Padahal, ide demokrasi dewasa ini sudah jauh meluas menembus batas-batas negara dengan segala tuntutan-tuntutannya yang serba-kompleks. Orang Amerika tidak lagi berbicara dalam lingkup Amerika, tetapi sudah regional, bahkan global. Secara embrional pemikiran demikian memang sudah ada sejak jaman filsuf alam, tetapi *tokh* urgensinya secara dahsyat baru dirasakan sekarang ini.

Di balik itu, sesungguhnya agak sulit pula untuk membuat penggolongan mana di antara pemikiran-pemikiran itu termasuk kategori klasik dan modern. Gagasan demokrasi tidak pernah lahir sebagai ide tunggal yang lepas dari konteks jamannya. Gagasan demokrasi merupakan sintesis dari proses dialektika dinamika politik suatu bangsa. Itulah sebabnya, tidak pernah ada gagasan yang persis sama untuk setiap jaman, sama tidak pernah adanya gagasan yang sama sekali berbeda. Gagasan demokrasi timbul dan terus timbul dalam perputaran spiral yang titik-titiknya tidak pernah bertemu sebagai suatu lingkaran utuh.

Sebagai contoh, gagasan demokrasi ala Plato pada Abad ke-4 SM. Dalam kerangka berpikir sekarang, orang dapat saja berkata bahwa gagasan demokrasi bersifat *contradictio in terminis*. Bagaimana mungkin, misalnya, kita dapat menyatakan pemikirannya demokratis apabila ia secara rasialis hanya memberikan kebebasan bagi bangsa Yunani, dan secara diskriminatif menyingkirkan hak-hak wanita, anak-anak, dan budak dalam kehidupan polis? Gugatan yang sama juga dapat ditujukan pada tokoh-tokoh lain dalam buku ini. Ternyata, kekuatan buku ini justru terletak pada keasyikan kita mengikuti pemikiran-pemikiran yang "kontradiktif" seperti itu. Di samping itu, sebagaimana terbitan Yayasan Obor yang lain, terjemahan buku ini juga cukup mudah diikuti.

Nilai buku ini memang terletak pada kemanfaatannya yang besar sebagai bahan rujukan, walaupun tidak dapat diandalkan sebagai sumber pemikiran yang utuh. Bagi pembaca yang baru pertama kali berkenalan dengan tokoh-tokoh dalam buku ini, kiranya akan mengalami kesulitan mencari konteks gagasan demokrasi yang dibicarakan. Pengantar yang dibuat oleh penyunting pada awal tiap-tiap tulisan memang sedikit membantu, tetapi tetap dirasakan kurang memadai untuk memberikan "benang merah" antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Alangkah baiknya jika Mochtar Lubis sebagai penyunting edisi bahasa Indonesia

dapat membuat pengantar yang lebih mengena. Katakanlah, semacam pertanggungjawaban atas pilihannya terhadap 23 karya itu ketimbang karya-karya selebihnya.

Misi lain yang perlu diungkapkan dalam buku ini - sebagaimana ditunjukkan oleh Mochtar Lubis dalam kata pengantarnya - adalah untuk membuka cakrawala berpikir generasi muda Indonesia tentang konsep demokrasi bangsa-bangsa di luar Indonesia. Mochtar sendiri tampaknya masih meyakini pandangannya tentang manusia Indonesia, yang pernah diucapkannya pada tahun 1977, ketika ia memberikan ceramah di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Ia seperti tidak percaya tentang nilai-nilai demokrasi Indonesia. "Kenyataannya bangsa kita setelah hampir 50 tahun merdeka masih belum berhasil memantapkan nilai-nilai demokrasi. Padahal kehidupan kita berbangsa dan bernegara seharusnya mendorong kita, baik rakyat maupun pemerintah untuk berupaya lebih keras lagi memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam Republik tercinta Indonesia," demikian tulisnya (halaman xiii).

Mengingat buku ini hanyalah terjemahan dari sebuah buku asing, alangkah baiknya apabila dalam kata pengantarnya, Mochtar Lubis dapat membuat kupasan yang sedikit komprehensif, agar konstelasi pemikiran tentang demokrasi dalam buku ini menemukan tempatnya dalam konteks "demokrasi" ala Indonesia yang didambakannya, atau setidaknya menurut cara pandang orang Timur.

Telah luas diketahui, bahwa di kalangan politisi Asia, ada pemikiran yang justru memandang demokrasi dengan kaca mata negatif sebagai produk kultural Barat. Dua tokoh yang mewakili pemikiran demikian dapat disebutkan di sini adalah Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad. Lee, misalnya, secara terus terang pernah mengatakan bahwa ia sama sekali tidak percaya apabila demokrasi diperlukan untuk mendorong pembangunan. Bagi suatu negara, lebih-lebih yang sedang berkembang, yang diperlukan adalah sikap disiplin. Kegairahan pada demokrasi akan menyebabkan sikap tidak disiplin, yang pada gilirannya menelantarkan semangat membangun masyarakat guna memperbaiki standar hidupnya. Ditambahkan oleh Mahathir, bahwa demokrasilah adalah biang kemunculan budaya homoseksual, dekadensi moral, intoleransi rasial, dan fenomena orang tua tunggal di Barat.

Boleh jadi paradigma berpikir model Lee dan Mahathir ini tidak akan disetujui oleh banyak orang. Sekalipun demikian model berpikir demikian sangat perlu untuk dicermati agar pembaca mengetahui model-model berpikir alternatif selain daripada - meminjam terminologi Mahathir - "agama" dari Barat ini (baca: demokrasi). Kalaupun pembaca tidak menemukan kupasan paradigma demikian dalam buku ini, setidaknya pembaca akan dapat menggunakan buku ini sebagai referensi yang bermanfaat untuk mencari konteks demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Dan sekali lagi, inilah nilai penting dari buku ini!

Imelda Martinelli